

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

SITI AMINAH

B 200 100 331

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA SURAKARTA”**

Yang ditulis oleh:

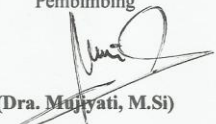
SITI AMINAH

B 200 100 331

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Januari 2014

Pembimbing

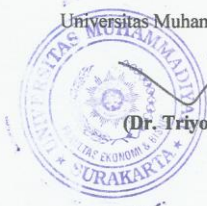

(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Triyono, SE, M.Si)



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KOTA SURAKARTA**

SITI AMINAH

B 200 100 331

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: sitiaminah14@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik dan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak. Peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting. Besarnya kontribusi pajak di dalam APBN pun selalu meningkat setiap tahun. Saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia dibiayai dari besarnya penerimaan pajak.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Rapina, *et al.* 2011).

Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Modernisasi perpajakan diawali pada tahun 1983 dengan melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap kebijakan perpajakan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi struktur organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Struktur Organisasi

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

Aprilina (2013) mengemukakan bahwa dimensi penerapan modernisasi struktur organisasi terdiri dari: (1) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab; (2) Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT); (3) Sistem monitoring pelaporan rutin melalui rekening Wajib Pajak (*Taxpayers Account*); (4) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan.

B. Prosedur Organisasi

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

Dimensi penerapan modernisasi prosedur organisasi terdiri dari: (1) Pelayanan satu pintu melalui *Account Representative (AR)*; (2) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak; (3) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak (Sofyan, 2005:39-40).

C. Strategi Organisasi

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan

selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

Menurut Aprilina (2013) kegiatan modernisasi strategi organisasi meliputi: (1) Sensus pajak Nasional; (2) Kampanye sadar dan peduli pajak; (3) Simplifikasi administrasi perpajakan;

D. Budaya Organisasi

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Kegiatan modernisasi budaya organisasi meliputi: (1) Adanya program pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*goodgovernance*); (2) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan kepada pegawai pajak; (3) Fasilitas perkantoran modern (Aprilina, 2013).

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dan Safri Nurmantu yang dikutip oleh Sinaga (2011), sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang menggunakan penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

B. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta 2013.

C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menghitung jumlah sampel minimum yang akan digunakan penelitian, menggunakan rumus *Slovin*. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *convenience sampling*.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang menjadi sampel untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam kuisioner. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner. Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup, dengan responden dapat memilih jawaban yang telah disediakan di dalam kuisioner. Kuisioner dibagikan

kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta yang telah dipilih untuk menjadi responden.

F. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. *Variable Independent*

Variable independent dalam penelitian ini adalah variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) yang dikembangkan dalam variabel reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha dalam Fasmi dan Misra (2013), terdiri dari struktur organisasi (X_1), prosedur organisasi (X_2), strategi organisasi (X_3), budaya organisasi (X_4).

2. *Variable dependent*

Variable dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5.

G. Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini merupakan pengujian validitas setiap item pertanyaan dengan menghitung korelasi *Product Moment Pearson* antara skor item dan skor total. Hasil uji dari validitas angket menggunakan program *SPSS 16 for Windows* diperoleh nilai r -hitung $>$ r -tabel (0,2257).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$, hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian *Kolmogorof-Smirnov*. Pada uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada atau tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai *tolerance* angka $> 0,10$ dan nilai VIF menunjukkan < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji Gleyser sebagai indikator terjadinya heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *variable independent* terhadap *variable dependent*. Dari hasil pengujian dapat dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 11,101 + 1,327S_{ko} + 0,103P_{ro} + 0,083S_{go} + 0,755B_{do} + \varepsilon$$

b. Uji Koefisien Determinasi

Untuk uji koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan nilai adjusted R Square yang menunjukkan angka sebesar 0,503. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 50,3% dan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

c. Uji F

Pada penelitian ini diperoleh F hitung $19,965 > F$ tabel 2,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini adalah fit.

d. Uji t

(1) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel struktur organisasi menunjukkan nilai untuk t hitung $5,655 > t$ tabel 1,99394, sehingga hasil penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya struktur organisasi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

(2) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel prosedur organisasi menunjukkan nilai untuk t hitung $0,454 < t$ tabel 1,99394, sehingga

hasil penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Artinya tidak ada pengaruh antara prosedur organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

(3) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel strategi organisasi menunjukkan nilai untuk t hitung $0,425 < t$ tabel $1,99394$, sehingga hasil penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a . Artinya tidak ada pengaruh antara strategi organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

(4) Hasil yang diperoleh dari uji t untuk variabel budaya organisasi menunjukkan nilai untuk t hitung $3,258 > t$ tabel $1,99394$, sehingga hasil penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya ada pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H. Simpulan

1. Variabel struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a .
2. Variabel prosedur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,651 > 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a .
3. Variabel strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,672 > 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a .
4. Variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a .

I. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta:

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa prosedur organisasi dan strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dari petugas pajak untuk meningkatkan prosedur dan strategi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang optimal dari petugas pajak kepada Wajib Pajak dan meningkatkan strategi dalam sosialisasi kepada Wajib Pajak. Dengan dilakukannya upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

- a. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel yang lain, seperti kepuasan Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak dan akuntabilitas, agar dapat membandingkan dan menyempurnakan hasilnya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambah jumlah KPP Pratama sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama yang ada di Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan penelitian yang mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diadakannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern agar hasilnya bisa lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi Jakarta: Salemba Empat.
- Aprilina, Ria. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*. Jurnal Akuntansi.
- Candra, Ricki, Haris Wibisono dan Mujilan. 2013. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.1 No.1 Februari 2013.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2013. Data base Wajib Pajak KPP Pratama Surakarta.
- Erwis, Nana Andriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. 2013. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Jurnal Akuntansi.
- Mujiyati dan Abdul Aris. 2011. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP.
- Patsal, Fitriana. 2012. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada KPP Pratama Di Wilayah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009: 119-138.

Rapina, Jerry dan Yenni Carolina. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011.

Sinaga, Ulam. 2011. *Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Suparman. 2007. "Sistem Administrasi Perpajakan Modern" (online), (<http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakan-modern.html>, diakses tanggal 17 September 2013).

Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Ulum, Ihyaul. 2011. *Klinik Skripsi*. Malang: Aditya Media Publishing.

....., Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.01/2008.

....., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

....., Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003.

....., Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007.

....., Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Didownload dari : www.reform.depkeu.go.id, diakses pada tanggal 23 September 2013.